

SINOPSIS

Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya sangat strategis dan merupakan kota transit jalur lalu lintas Kodya Surakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota yang memiliki wilayah strategis dan merupakan persinggungan dua kota besar umumnya memiliki akses transportasi yang ramai. Hal ini secara otomatis menghasilkan PAD yang unggul dari sektor retribusi. “Analisa Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaen Klaten tahun 2009” merupakan hal yang menarik ketika di jadikan sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui “Bagaimana Kinerja Pemerintah dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten Tahun 2009?” Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui tata cara Pemerintahan Daerah dalam pemungutan retribusi pasar di kabupaten Klaten tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus pada suatu kantor instansi pemerintah yang merupakan salah satu jenis penelitian yang mendasarkan pada suatu kejadian atau suatu tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai adanya pembatasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu “Analisa Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaen Klaten tahun 2009”, maka yang menjadi unit analisis data adalah pemerintahan kabupaten Klaten dalam hal ini DISPERINDA sebagai instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam pemungutan retribusi Pasar.

Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Klaten sampai saat ini sudah efektif sesuai dengan rencana kerja dan tidak ada masalah, dan terkendali dengan baik, para pedagang juga membayar retribusi sesuai dengan tarif dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan para pedagang tidak mengeloh dengan masalah pemungutan retribusi pasar dan semua pedagang bisa menerima apa yang dijalankan oleh para petugas pemungut retribusi pasar. Sepanjang ini para pedagang mau membayar retribusi sesuai dengan tarip dan ketentuan yang berlaku dan para pedagang tidak mengeluh dalam hal ini pedagang bisa menerima besarnya pungutan yang dipungut oleh petugas pemungut dan tuidak ada batas kaitanya besarnya tarip yang dipungut ileh petugas pemungut retribusi pasar.

Akhirnya sebagai kesimpulan diiharapkan agar Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten segera menetapkan sistem dan prosedur yang ada dalam MAPATDA sepenuhnya dengan tetap melakukan target penerimaan pajak. Untuk mendukung kemandirian daerah dan meningkatkan PADS, bila memungkinkan sebaiknya dioperasikan komputer dalam keseluruhan kegiatan di Dipenda baik pendaftaran dan pendataan, penetapan maupun penyeterannya.